

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil penelitian saya dan perumusan masalahnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pelaku industri batik dalam mendukung industri batik lokal di Kota Pekalongan dapat disimpulkan dalam beberapa hal:

- 1.) Upaya pengembangan guna mendukung industri batik lokal di Kota Pekalongan melibatkan berbagai aktor di dalamnya, yaitu Pemerintah Kota Pekalongan, pelaku industri batik, serta berbagai lembaga dan kelompok masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui instansi-instansi terkait, seperti DPRD Kota Pekalongan, BAPPEDA Kota Pekalongan, Dekranasda Kota Pekalongan, serta Disperindagkop Kota Pekalongan sebagai dinas terkait yang memiliki tugas serta wewenang dalam pengembangan industri batik. Pelaku industri batik sendiri adalah mereka para pengrajin batik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Pekalongan, baik pelaku industri batik kecil, menengah, maupun besar. Lembaga dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya pengembangan industri batik itu sendiri adalah berbagai lembaga pendidikan serta ormas seperti Politeknik Pusmanu dan Unikal sebagai universitas serta ASEPHI yang ditunjuk langsung oleh Pemkot Pekalongan sebagai mitra kerja dalam upaya pengembangan industri batik di Kota Pekalongan.

2.) Pemerintah Kota Pekalongan telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait batik guna mendukung industri batik sebagai wujud nyata upaya pengembangan batik serta sebagai acuan kerja dalam proses pelaksanaannya. Setidaknya terdapat lima kebijakan baik berupa perwali maupun perda dari Pemkot Kota Pekalongan yang terkait tentang batik, yaitu Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Pekalongan, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Branding* Kota Pekalongan, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Label “Batik Pekalongan”.

3.) Dalam membuat atau menyusun kebijakan baik berupa regulasi maupun program pemberdayaan terkait industri batik di Kota Pekalongan, Pemkot Pekalongan mendapat tekanan dari para pelaku industri batik agar kebijakan yang dibuat nantinya akan dapat lebih menguntungkan serta memperkuat posisi daripada para pelaku industri batik.

4.) Wujud sinergi yang terjadi antara Pemkot Pekalongan dengan pelaku industri batik dalam upaya pengembangan industri batik lokal di Kota Pekalongan terbentuk melalui berbagai wujud, seperti melalui program pembinaan dan pelatihan, pemberian bantuan, pelaksanaan serta

pengikutsertaan dalam berbagai event promosi batik, revitalisasi sentra-sentra perbelanjaan batik, program-program khusus seperti curhat batik dan inkubator bisnis, klasterisasi industri batik, dan pengembangan kampung-kampung batik.

- 5.) Dalam proses sinergi yang terjalin antara Pemkot Pekalongan dengan para pelaku industri batik ternyata juga terjadi konflik antara Pemkot dengan kelompok atau paguyuban pelaku industri batik di tingkat regional. Konflik tersebut terjadi akibat pengambil alih aset-aset paguyuban oleh Pemkot secara sepihak bahkan pihak paguyuban tidak lagi dilibatkan dalam proses pengelolaannya.
- 6.) Dalam proses pengembangan industri batik lokal di Kota Pekalongan hingga saat ini, justru menampakkan adanya pola patron klient yang menunjukkan dominasi para juragan batik atas para pengrajin batik kecil dari segi akses pasar. Posisi juragan batik juga makin diuntungkan dengan berbagai upaya pengembangan industri batik yang dilakukan oleh Pemkot di nilai lebih bisa dinikmati dan diakses oleh pelaku industri batik menengah keatas Sementara itu, pihak yang dirugikan dalam wujud sinergi yang berjalan adalah para pelaku industri batik golongan kecil. Hal itu dikarenakan belum meratanya pemberian bantuan kepada para pelaku industri batik kecil, minimnya akses program pembinaan dan pelatihan karena minimnya sosialisasi, serta para pelaku industri kecil yang tidak dapat mengikuti pameran karena minimnya modal serta rendahnya kualitas produksi sehingga tidak bisa memenuhi

standar produk pameran.. Hal tersebut ditambah dengan akses pasar mereka yang tertutup oleh para pelaku industri batik menengah keatas.

## 7.2 Saran

Saran dalam penelitian ini disusun berdasarkan kesimpulan mengenai sinergi yang terjadi dalam upaya pengembangan industri batik lokal di Kota Pekalongan. Saran ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan industri batik di Kota Pekalongan. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Pemerintah Kota Pekalongan dalam membuat berbagai peraturan terkait industri batik baik berupa kebijakan maupun program haruslah dapat bersifat menyeluruh, artinya dampak positif dari peraturan tersebut haruslah dapat dinikmati oleh berbagai golongan pelaku industri batik hingga kelas terbawah. Sehingga sinergi yang terjadi akan lebih baik serta dampaknya terhadap perkembangan industri batik akan lebih menyeluruh.
- 2.) Kedepan, Pemkot Pekalongan harus dapat lebih melihat permasalahan bahan baku serta dampak lingkungan dari industri batik sebagai permasalahan utama dalam keberlangsungan industri batik di Kota Pekalongan. Pemerintah harus dapat memberikan proteksi lebih dalam proses pemenuhan bahan baku batik, baik dalam bentuk pengawasan dalam proses pemenuhan bahan baku agar tidak terjadi monopoli yang justru merugikan para pelaku industri batik. Pemkot juga harus melihat dampak lingkungan akibat industri batik sebagai satu kesatuan dari pengembangan industri tersebut, karena sampai saat ini permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan

tersendiri dalam proses pengembangan industri batik. Pemkot Pekalongan haruslah tidak hanya berupaya bagaimana cara meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi dari industir batik, melainkan juga harus mampu mengatasi dampak lingkungan dari industri tersebut.

- 3.) Pemkot Pekalongan serta para pelaku industri harulah melihat buruh batik sebagai bagian dari aktor lain dalam upaya pengembangan industri batik lokal. Posisi buruh batik sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan indsutri batik, terutama golongan menengah keatas. Pemkot bersama pelaku industri dirasa perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur secara pasti mengenai upah kerja buruh batik. Hal itu guna meningkatkan kesejahteraan para buruh batik serta menjaga keberlangsungan industri batik di Kota Pekalongan.

